

Volume 9, Nomor 1, Mei 2011

ISSN:1693-9018

# LOGIKA

*Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*



**ALUMNI PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
AMBON**

## ANALISIS DISKRIMINAN RISIKO KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK

P. Usmany\*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk: memprediksi kecenderungan wajib pajak sesuai dengan risiko ketidakpatuhan (rendah, menengah dan tinggi), dan mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh kepada ketidakpatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan perbedaan antara variabel untuk membedakan risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Untuk kelompok risiko ketidakpatuhan rendah, dua variabel yang paling dominan adalah profitabilitas dan tarif efektif. Untuk sampel kelompok risiko ketidakpatuhan menengah, dua variabel yang paling dominan adalah tarif efektif dan kelompok usaha. Sedangkan untuk sampel kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi, dua variabel yang paling dominan intensitas, dan penalti. Variabel yang membedakan wajib pajak ke dalam kelompok risiko ketidakpatuhan rendah atau menengah adalah tarif efektif. Sedangkan variabel *debt to equity ratio* adalah prediktor yang mampu membedakan apakah wajib pajak masuk ke dalam kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi atau menengah. Fungsi diskriminan yang terbentuk dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelompokan wajib pajak ke dalam risiko ketidakpatuhan rendah, menengah dan tinggi.

**Kata-kata kunci:** Deskrimina reiko, dan ketidakpatuhan wajib pajak

## PENDAHULUAN

Komponen penerimaan pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kebutuhan penerimaan pajak dalam APBN memiliki konsekuensi dan berpengaruh terhadap sumber daya perpajakan, terutama dalam melaksanakan tugas secara efisien dan efektif.

Pemeriksaan pajak merupakan wujud dari fungsi pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan perencanaan pemeriksaan pajak, penentuan *audit risk* dan *inherent risk* dapat dianalogikan dengan penentuan risiko bahwa para wajib pajak akan melakukan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga berpotensi terdapat kesalahan dalam pelaporan pajaknya.

Penentuan risiko wajib pajak dapat dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu di tingkat kebijakan berupa penentuan wajib pajak mana yang akan diperiksa (*audit selection*) dan tingkat operasional, yaitu pada saat melakukan pemeriksaan wajib pajak.

Penentuan risiko wajib pajak pada tingkat kebijakan mutlak dilakukan karena administrasi pajak tidak akan mungkin melakukan pemeriksaan atas seluruh wajib pajak yang terdaftar mengingat keterbatasan sumber daya yang ada (OECD, 2005). Pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa yang efektif (*effective audit case selection*) akan menimbulkan persepsi positif di wajib pajak karena wajib pajak yang patuh mempunyai risiko diperiksa yang lebih kecil dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Di sisi lain, pemeriksaan akan menjadi lebih efisien karena hanya fokus pada wajib pajak yang tidak patuh (Millack, 2005).

Pemeriksaan yang tidak memperhitungkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berakibat pada dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak wajib pajak patuh, sementara wajib pajak

---

\* P. Usmay, SE, M.Si adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unpatti Ambon

yang tidak patuh justru tidak diperiksa. Hal ini akan berakibat pada rendahnya efektivitas tujuan pemeriksaan yaitu terciptanya kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

## LANDASAN TEORI

### 1. Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan pengumpulan pajak, administrasi pajak akan menghadapi risiko atas penerimaan dari wajib pajak yang tidak patuh atau risiko ketidakpatuhan wajib pajak, yakni risiko yang harus ditanggung oleh administrasi pajak karena perilaku wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar (*taxes at risk*) (OECD, 2001). Gunadi (2005) mengasosiasikan risiko ini sebagai *tax gap*, yaitu selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual atau perbedaan antara realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan yang seharusnya diterima apabila wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara penuh.

Sementara itu, Sommerfeld et al (1994) menjelaskan *tax gap* sebagai besarnya penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan, yang berbentuk baik penghasilan yang tidak dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deductions*). Berdasarkan penjelasan Sommerfeld et al ini, dapat disimpulkan bahwa *tax gap* akibat ketidakpatuhan wajib pajak badan di Indonesia adalah gabungan antara selisih penghasilan yang dilaporkan wajib pajak (SPT) dengan penghasilan menurut hasil pemeriksaan (koreksi penghasilan) dan biaya yang dilaporkan wajib pajak (SPT) dengan biaya menurut hasil pemeriksaan (koreksi biaya). Dengan demikian, ketidakpatuhan wajib pajak badan dalam satu tahun dapat diukur dengan koreksi penghasilan dan koreksi biaya pengurang penghasilan. Kedua jenis koreksi ini merupakan koreksi penghasilan neto wajib pajak sebelum diperhitungkan dengan kompensasi kerugian dari tahun pajak sebelumnya yang dimiliki oleh wajib pajak.

Apabila dihubungkan dengan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya, maka wajib pajak dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok berdasarkan risiko ketidakpatuhannya (OECD, 2005), yaitu: risiko ketidakpatuhan rendah, menengah dan tinggi. Kelompok risiko ketidakpatuhan rendah mencakup wajib pajak yang secara sadar mempunyai kemauan untuk patuh. Wajib pajak dalam kelompok ini mempunyai komitmen untuk mendukung dan menerima sistem yang ada, yaitu sistem yang menghendaki bahwa sebagai anggota masyarakat mereka harus membayar pajak, dan bersedia melaksanakan kewajiban yang dikehendaki oleh sistem tersebut. Kelompok risiko ketidakpatuhan menengah meliputi kelompok wajib pajak yang pada prinsipnya mereka bersedia melaksanakan kewajiban yang dikehendaki oleh sistem perpajakan yang ada, akan tetapi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena kurangnya pemahaman atas hal-hal yang menjadi kewajiban mereka. Sedangkan kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi mencakup kelompok wajib pajak yang secara sadar tidak mau memenuhi kewajiban mereka atau wajib pajak yang enolok sistem perpajakan yang ada.

### 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Banyak penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Allingham dan Sandmo (1972) menggunakan konsep *expected utility* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Mereka menggunakan variabel-variabel yang dikenal sebagai faktor ekonomi, yaitu: penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, besarnya peluang untuk diperiksa dan besarnya penalti. Sementara Erard (1997) menyimpulkan bahwa skala usaha wajib pajak dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Joulfaian dan Rider (1998) menyatakan, selain tarif pajak, jenis usaha wajib pajak serta faktor demografi yang meliputi usia, keluarga (*family size*), dan tempat tinggal/lokasi akan mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Jenis usaha yang dibahas oleh Joulfaian dan Rider juga dibahas oleh Forest (2004).

Krause (2000) berpendapat bahwa pengetahuan atau pemahaman wajib atas peraturan perpajakan dapat berpengaruh terhadap patuh tidaknya wajib pajak. Pendapat Krause ini sejalan

dengan OECD (2001) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain variabel di atas, faktor personal dan situasional wajib pajak dapat juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor personal tersebut meliputi moral, orientasi nilai dan preferensi terhadap risiko. Sedangkan faktor situasional meliputi ada atau tidak adanya pemeriksaan pajak, ketidaksamaan beban pajak, bagaimana perilaku kelompok referensi dalam pelaporan pajak, dan faktor tersedianya barang publik (Trivedi et al, 2001).

Kesempatan untuk melakukan *underreporting* akan mendorong kecenderungan wajib pajak melakukan ketidakpatuhannya dalam membayar pajak. Sementara unsur permodalan (Chattopadhyay et al, 2002) yang menyangkut siapa pemegang saham perusahaan juga bagaimana struktur modal melalui perbandingan hutang dengan ekuitas akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam analisis kepatuhan yang dikembangkan oleh Allingham et al (1972), individu diasumsikan memperoleh penghasilan yang jumlahnya tetap dan harus memilih berapa jumlah penghasilan yang akan dilaporkan pada administrasi pajak. Apabila seorang individu memperoleh penghasilan yang sebenarnya sebesar  $y$ , pendapatan yang dilaporkan  $x$ , penghasilan setelah pajak penghasilan  $v$ , tarif pajak  $t$ , tingkat kemungkinan terdeteksi  $p$  dan denda atas penghasilan yang tidak dilaporkan  $s$ , maka berdasarkan konsep *expected utility*, seorang wajib pajak akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa sehingga tingkat *expected utility* dari penghasilan yang diterimanya,  $EU [I]$ , akan maksimal. Tingkat  $EU$  seorang wajib pajak adalah fungsi dari *utility* penghasilan setelah pajak baik dalam kondisi penghasilan yang tidak dilaporkan terdeteksi maupun tidak.

## METODE

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder dan anonim dari data hasil pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan tahun pajak 2005 yang selesai diperiksa sampai dengan Pebruari 2009 dan data SPT wajib pajak. Data diperoleh dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP), Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Maluku.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada sumber data sesuai unit analisis, wajib pajak badan yang telah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Maluku dan data yang diambil dari SIP dalam bentuk *Microsoft Excel*. Model persamaan matematis berikut ini merupakan visualisasi model diskriminan dengan kombinasi linier. Model tersebut digunakan untuk mengelompokkan wajib pajak berdasarkan risiko ketidakpatuhan (rendah, menengah dan tinggi) yang diukur dari koreksi penghasilan netto.

$$D = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5$$

Keterangan :

- D = Nilai diskriminan
- b = Koefisien masing-masing variabel bebas
- $X_1$  = Tarif efektif
- $X_2$  = Sanksi
- $X_3$  = Profitabilitas
- $X_4$  = Kelompok Usaha
- $X_5$  = Intensitas pemeriksaan

Fungsi diskriminan dalam model ini diharapkan mampu menjadi alat efektif untuk menjelaskan para wajib pajak yang tidak patuh, dan juga diharapkan mampu mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak. Untuk memudahkan analisis data, dalam penelitian ini digunakan bantuan *software* SPSS 16.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menjawab hipotesis penelitian ini maka perlu dilakukan beberapa tahap analisis berikut ini.

Hipotesi 1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara kelompok wajib pajak berdasarkan tingkat risiko ketidapatuhan rendah, menengah dan tinggi.

Tahap pertama dalam uji diskriminan ini adalah memberikan nilai pada variabel tidak bebas (dalam hal ini tingkat risiko wajib pajak) dengan nilai kategorial. Untuk itu dibuat pembagian sebagaimana dilihat pada Tabel 1

**Tabel 1. Kategori Pembagian Kelompok Untuk Analisis Diskriminan**

No	Kriteria Pembagian Nilai	Kategori	Wajib Pajak
1.	Koreksi $\leq 10\%$	1	Risiko ketidapatuhan rendah
2.	$10\% < \text{Koreksi} \leq 20\%$	2	Risiko ketidapatuhan menengah
3.	Koreksi $> 20\%$	3	Risiko ketidapatuhan tinggi

Untuk melihat kelayakan analisis diskriminan, pengujian pertama yang dilakukan adalah membandingkan nilai rata-rata dari setiap prediktor (variabel bebas) setiap kelompok wajib pajak (berisiko ketidapatuhan rendah, menengah, dan tinggi), sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Rata-rata Prediktor Untuk Setiap Pengelompokan**

Ketidapatuhan		Mean	Std. Deviation	Valid N (listwise)	
		Unweighted	Weighted	Unweighted	Weighted
rendah	Tarif Efektif	1,6154	,69725	26	26,000
	Penalti	1,4615	,50839	26	26,000
	Profitabilitas	86,3838	17,21600	26	26,000
	Kelompok Usaha	1,5769	,50383	26	26,000
	Intensitas Pemeriksaan	1,8846	,86380	26	26,000
menengah	Tarif Efektif	1,9811	,49964	53	53,000
	Penalti	1,7547	,43437	53	53,000
	Profitabilitas	176,0636	28,38529	53	53,000
	Kelompok Usaha	1,8868	,42337	53	53,000
	Intensitas Pemeriksaan	2,0566	,56891	53	53,000
tinggi	Tarif Efektif	2,3889	,65637	54	54,000
	Penalti	1,7037	,46091	54	54,000
	Profitabilitas	201,2181	56,50231	54	54,000
	Kelompok Usaha	1,8333	,42337	54	54,000
	Intensitas Pemeriksaan	2,6296	,52472	54	54,000
Total	Tarif Efektif	2,0752	,66996	133	133,000
	Penalti	1,6767	,46951	133	133,000
	Profitabilitas	168,7453	58,68896	133	133,000
	Kelompok Usaha	1,8045	,45157	133	133,000
	Intensitas Pemeriksaan	2,2556	,69254	133	133,000

Untuk menguji seluruh prediktor masing-masing kelompok statistik digunakan adalah *Wilk's Lambda*. Semakin kecil nilai *Wilk's Lambda* semakin nyata perbedaan rata-rata setiap

prediktor pada ketiga kelompok tersebut. Statistik ini diuji dengan Statistik *F* untuk mengukur seberapa tinggi tingkat signifikansi perbedaan rata-rata setiap prediktor, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Uji Kesamaan Rata-Rata Grup**

	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
Tarif Efektif	,810	15,285	2	130	,000
Penalti	,946	3,696	2	130	,027
Profitabilitas	,481	70,247	2	130	,000
Kelompok Usaha	,935	4,521	2	130	,013
Intensitas Pemeriksaan	,791	17,175	2	130	,000

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel penalti memiliki tingkat signifikansi yang tinggi (sebesar 0,946). Hal ini berarti ada perbedaan rata-rata penalti antar grup. Dengan kata lain kelompok wajib pajak yang berisiko ketidakpatuhan rendah, menengah dan tinggi dipengaruhi oleh penalti. Dengan penjelasan yang sama dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel penduga memiliki pengaruh yang nyata dalam mengelompokkan wajib pajak ke dalam kelompok wajib pajak berisiko ketidakpatuhan rendah, menengah dan tinggi. Taraf nyata setiap variabel inipun sangat tinggi yakni 95% kecuali untuk variabel profitabilitas yang mencapai 48%. Tabel 3 juga memberikan gambaran seberapa besar penurunan varian yang tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan antar grup.

Pada Tabel 4 berikut ini tampak bahwa setiap penambahan variabel sebagai prediktor, angka *Wilks' Lambda* semakin kecil. Misalnya ketika variabel kedua (penalti) ditambahkan ke dalam model, varian tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan antar group turun dari 48,1% menjadi 41,3%.

**Tabel 4. Wilks' Lambda**

Step	Number of Variables	Lambda	df1	df2	df3	Exact F			
						df1	df2	Sig.	Statistic
1	1	,481	1	2	130	70,247	2	130,000	,000
2	2	,413	2	2	130	35,855	4	258,000	,000
3	3	,383	3	2	130	26,234	6	256,000	,000
4	4	,355	4	2	130	21,512	8	254,000	,000
5	5	,338	5	2	130	18,122	10	252,000	,000

Output pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel penjelas memiliki peran yang baik karena angka *Wilks' Lambda* secara konsisten turun ketika dimasukkannya variabel penjelas pertama (tarif efektif) hingga variabel kelima (kelompok usaha). Analisis ini juga dapat dilihat, pada kolom *F* dan signifikansinya, bahwa seluruh variabel signifikan secara statistik. Artinya, kelima variabel yang menjadi penduga variabel risiko ketidakpatuhan memang berbeda untuk ketiga kelompok risiko ketidakpatuhan wajib pajak atau juga dapat diartikan bahwa kelima variabel yang dijadikan variabel independen merupakan variabel-variabel yang benar-benar dapat dijadikan sebagai variabel yang mampu memprediksi kelompok wajib pajak berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhan rendah, menengah, dan tinggi.

Tahap selanjutnya adalah menguji perbedaan antar kelompok wajib pajak menurut risiko ketidakpatuhan. Berikut adalah uji perbedaan dua fungsi diskriminan yang membedakan ketiga kategori wajib pajak.

**Tabel 5. Uji Perbedaan Antar Grup Wajib Pajak**

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	1,420(a)	86,5	86,5	,766
2	,221(a)	13,5	100,0	,426

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua fungsi diskriminan untuk membedakan tiga kategori risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Tabel 5 memberikan gambaran korelasi kanonik antara dua fungsi diskriminan tersebut dengan grup (pengelompokan). Fungsi Diskriminan Pertama memiliki korelasi sebesar 0,766 yang menggambarkan korelasi yang cukup tinggi dengan ukuran skala asosiasi 0 hingga 1. Hal yang sama juga berlaku untuk korelasi kanonik dari Fungsi Diskriminan Kedua dengan grup yang mencapai 0,426. Tabel 5 juga dihasilkan *eigenvalue* yang merupakan rasio *sum of square* antar kelompok (*between group*) dengan dalam kelompok (*within group*). Semakin tinggi harga *eigenvalue*, maka semakin baik fungsi tersebut dalam menjelaskan variabel yang diamati. Jika faktor pada fungsi 1 yang digunakan, maka 76,6% varian dari variabel memprediksi tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh fungsi diskriminan yang terbentuk pada fungsi 1, sisanya dapat dijelaskan oleh fungsi 2 sebesar 23,4%.

Perbedaan rata-rata (*centroid*) dari kedua fungsi diskriminan yang dihasilkan akan ditunjukkan pada tabel 6. Dengan perolehan  $\chi^2$  hitung sebesar 138,706 diperoleh tingkat signifikansi yang tinggi sebesar 99% (dilihat *p-value* yang mendekati 0). Hal ini menyatakan bahwa kelima variabel penjelas (mulai dari variabel tarif efektif hingga variabel kelompok usaha) memang berbeda antara kategori wajib pajak berisiko ketidakpatuhan rendah, menengah maupun tinggi.

**Tabel 6. Uji Perbedaan Rata-Rata (Centroid) Fungsi Diskriminan**

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1 through 2	,338	138,706	10	,000
2	,819	25,586	4	,000

Pengujian kedua tampak pada Tabel 6 bertujuan membedakan antara wajib pajak yang masuk dalam kategori risiko ketidakpatuhan menengah dan tinggi saja (setelah Fungsi Diskriminan Pertama dikeluarkan). Dengan perolehan  $\chi^2$  hitung sebesar 25,586 diperoleh tingkat signifikansi yang tinggi pula sebesar 99%. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata (*centroid*) yang jelas dari Fungsi Diskriminan Kedua (kelima variabel penjelas dalam kategori wajib pajak berisiko ketidakpatuhan menengah dan tinggi).

**Tabel 7. Fungsi Diskriminan**

	Function	
	1	2
Tarif Efektif	,475	-,640
Penalti	,268	1,213
Profitabilitas	,022	,007
Kelompok Usaha	,354	1,055
Intensitas Pemeriksaan	,286	-1,373
(Constant)	-6,390	-,774

Unstandardized coefficients

Tabel 8. Kelayakan Fungsi Diskriminan Classification Results(a)

Ketidapatuhan			Predicted Group Membership			Total
			rendah	menengah	tinggi	rendah
Original	Count	Rendah	26	0	0	26
		menengah	3	37	13	53
		Tinggi	3	12	39	54
%		Rendah	100,0	,0	,0	100,0
		menengah	5,7	69,8	24,5	100,0
		Tinggi	5,6	22,2	72,2	100,0

a 76,7% of original grouped cases correctly classified.

Tabel 8 menjelaskan klasifikasi hasil yang digunakan untuk menilai seberapa baik fungsi diskriminan. Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, maka fungsi diskriminan mampu mengelompokkan wajib pajak berdasarkan tingkat resiko ketidapatuhan adalah sebesar 76,7%. Kemampuan mengelompokkan wajib pajak berdasarkan tingkat resiko ketidapatuhan rendah adalah 100% (26/26); tingkat ketidapatuhan menengah 69,8% (37/53); dan tingkat ketidapatuhan tinggi 72,2% (12/39). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa fungsi diskriminan yang dihasilkan sudah layak untuk membedakan ketiga kategori wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 didukung.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa terdapat perbedaan variabel untuk membedakan wajib pajak dalam kelompok risiko ketidapatuhan rendah, menengah dan tinggi. Setelah fungsi diskriminan dapat membedakan wajib pajak menurut kelompok risiko rendah, menengah, dan tinggi, langkah selanjutnya adalah mencari variabel penjelas manakah yang membedakan kelompok tersebut untuk menjawab hipotesis kedua, “terdapat perbedaan variabel untuk membedakan wajib pajak dalam kelompok risiko ketidapatuhan rendah, menengah dan tinggi”.

Tabel 9. Penamaan Fungsi Diskriminan

Variabel	Function	
	1	2
Profitabilitas	,870(*)	,149
Tarif Efektif	,384(*)	-,344
Intensitas Pemeriksaan	,353	-,630(*)
Kelompok Usaha	,189	,293(*)
Penalti	,171	,265(*)

Tabel 9 menggambarkan besarnya korelasi kanonik dari setiap variabel penjelas dengan fungsi diskriminan kanonik (*standardized canonical discriminant functions*). Tampak bahwa korelasi antara variabel penjelas “profitabilitas” dengan fungsi diskriminan pertama (sebesar 0,870) lebih besar dari pada korelasinya dengan fungsi diskriminan kedua (sebesar 0,149). Oleh karena itu, variabel profitabilitas masuk ke dalam fungsi diskriminan pertama. Dengan penjelasan yang sama, maka variabel yang masuk ke dalam fungsi diskriminan pertama adalah tarif efektif. Sedangkan variabel penjelas yang masuk ke dalam fungsi diskriminan kedua adalah intensitas pemeriksaan, kelompok usaha, dan penalti.

Dengan demikian, variabel profitabilitas merupakan variabel yang membedakan antara kelompok wajib pajak berisiko ketidapatuhan rendah dan menengah. Sedangkan variabel kelompok usaha adalah variabel yang membedakan kelompok wajib pajak berisiko ketidapatuhan menengah dan tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 didukung.



**KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil membentuk fungsi diskriminan yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak; rendah, menengah dan tinggi, yang diukur dengan besaran koreksi penghasilan neto. Besaran yang dipakai dalam penelitian ini adalah koreksi penghasilan neto kurang dari 10% untuk kelompok risiko ketidakpatuhan rendah, koreksi penghasilan neto antara 10% hingga 20% untuk kelompok ketidakpatuhan menengah dan koreksi penghasilan neto lebih besar dari 20% untuk kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi.

Setelah wajib pajak dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhannya berdasarkan fungsi diskriminan hasil penelitian ini, beberapa temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar penentuan wajib pajak, dalam setiap kelompok risiko, yang diprioritaskan akan diperiksa. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat variabel-variabel yang secara dominan mempengaruhi risiko ketidakpatuhan wajib pajak dalam setiap kelompok risiko, rendah, menengah dan tinggi.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Ali, M.M., H.W. 2001. *Cecil and J.A. Knolbett. The effects of tax rates and enforcement policies on taxpayer compliance: A study of self-employed taxpayers. American Economics Journal* 29 (2), 186-202.
- Alm, J. A. 1991. *Perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting. The Accounting Review* 66(3), 577-593.
- \_\_\_\_\_, Betty R. Jackson, and Michael McKee. Estimating the determinants of taxpayer with experimental data. *National Tax Journal* 45, 107-114, 1992.
- Andreoni, J., B. Erard and J. Feinstein. Tax compliance. *Journal of Economic Literature* 36 (2), 818- 860, 1992.
- Antonides, G. and H.S.J. Robben. True positives and false alarms in the detection of tax evasion. *The Journal of Economic Psychology* 16 (4), 617-640, 1995.
- \_\_\_\_\_ and I. Ajzen. Predicting dishonest actions using the theory of planned behavior. *Journal of Research in Personality* 25 (3), 285-301, 1991.
- \_\_\_\_\_ and J.S. Davis and W.O. Jung. Experimental evidence on taxpayer reporting decision under uncertainty. *The Accounting Review* 66(3), 535-558, 1991.
- Arens, Alvin A., Mark S. Beasley and Randal J. Elder. *Auditing and Auditing Services: An Integrated Approach*. 11th edition. New Jersey, Prentice Hall, 2006.
- Carnes, G.A. and T.D. Engelbrecht. An investigation of the effect of detection risk perceptions, penalty sanctions and income visibility on tax compliance. *Journal of American Taxation Association* 17 (1), 26-41, 1995.
- Chattopadhyay, S. and Arindam Das Gupta. 2002. *The Personal income tax in India: Compliance costs and compliance behaviour of taxpayers. National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi*.
- Collins, J.H. and R.D. Plumlee. The taxpayer's labor and reporting decision: the effect of audit schemes. *The Accounting Review* 66(3), 559-576.
- Cooper, Donald R., and Pamela S. Schindler. *Business Research Methods*. Singapore: McGraw-Hill Book Co., 2001.
- Erard, B and J.S. Feinstein. Honesty and evasion in the tax compliance game. *RAND Journal of Economics*, 1994.
- \_\_\_\_\_, B. "Compliance Measurement And Workload Selection With Operational Audit Data". A paper prepared for *The Internal Revenue Service Research Conference*. George Washington University. USA, 2002.
- Falkinger, J. Tax evasion, consumption of public goods and fairness. *Journal of Economic Psychology* 16, 63-72, 1995.
- Feld, Lars P. and Bruno S. Frey. 2002. The Tax Authority and The Taxpayer An Exploratory Analysis. *Journal of Economic Literature*.

- Forest, Adam. 2004. Targeting Occupations to Increase Tax Revenue". *Journal of Economic Literature*.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunadi, Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 4 no. 5, 4-9, 2005.
- Hair, J.E., R.E. Anderson, R.L. Tatham, and W.C. Back, *Multivariate Data Analysis*, 4th ed. New Jersey:Prentice Hall, 1995.
- Joulfaian, David and Mark Rider. 1998. *Tax Evasion by small business*. Office of Tax Analysis, Washington, DC: U.S. Department of Treasury.
- Krause, K. 2000. Tax complexity: problem or opportunity? *Public Finance Review* 28 (5), 395-414.
- Lenderman, Leandra. 2003. The Interplay Between Norms And Enforcement In Tax Compliance". *Ohio State Law Journal* 64 (6), 1453-1514, 2003.
- Modeo, S.A., A. Schepanski and W.C. Uecker. Modeling judgements of taxpayer compliance. *The Accounting Review* 62 (2), 323-342, 1987.
- Murphy, K. "Trust Me, I'm The Taxman: The role of trust in nurturing compliance. Center for Tax System Integrity. The Australian National University, 2002.
- Organization for Economic and Cooperation Development. Compliance Measurement - Practice Note: 1-23. 2001.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Risk management-practice note*.: 1-17.
- Park, Chang-Gyun, Jin Kwon Hyun, and Ilho Yoo. 2002. *The Determinants of Tax Compliance by Experimental Data: A Case Of Korea*", 2002.
- Plumley, Alan H. 2002. *The Impact of The IRS On Voluntary Tax Compliance: Preliminary Empirical Results*". Working paper. *National Tax Association 95th Annual Conference on Taxation*. Orlando, FL. USA.
- Porcano, T.M. 1998. The correlates of tax evasion. *Journal of Economic Psychology* 9, 47-67.
- Reinganum, J.F. and Louis L. Wilde, Income Tax Compliance in a Principal-Agent Framework. *Journal of Public Economics* 26, 1-18, 1985.
- Robben, H.S.J., P. Webbley, H. Elffers and D.J. Hessing. 1990. Decision frames, opportunity, and tax evasion. *Journal of Economic Behavior and Organization* 14 (3), 353-361.
- Sommerfeld, Ray M., Silva A. Madeo, Kennet R. Anderson, and Betty R. Jackson. *Concepts of Taxation 1994 edition*. Fort Worth. The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.
- Trivedi, V. U., M. M. Shehata, and B. E. Lynn. Impact of Personal and Situational Factors on Tax Compliance: An Experimental Analysis. *Journal of Business Ethics*, Oktober 2003.
- Young, J.C. 1994. Factors associated with noncompliance: evidence from the Michigan Tax Amnesty program. *Journal of American Taxation Association* 19 (2), 82-10.